

PENGARUH DINASTI POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Alvina Alya Rahma¹, Afifah Amaliah Oktaviani², Azmi Hofifah³, Tsaqila Ziyah Ahda⁴,
Rana Gustian Nugraha⁵

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alvinaalyarahma@upi.edu¹ afifahamaliah@upi.edu² azmihofifah@upi.edu³
tsaqilaziyann@upi.edu⁴ ranaagustian@upi.edu⁵

Abstrak

Artikel ini membahas tentang perkembangan dinasti politik di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi pancasila. Latar belakang dari pembahasan tentang perkembangan dinasti politik di Indonesia dalam penelitian ini yakni karena adanya fenomena politik dinasti aras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Selain itu, pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dinasti politik secara turun temurun. Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro kontra ditengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Demokrasi, Dinasti Politik

Abstract

This article discusses the development of political dynasties in Indonesia and its impact on Pancasila democracy. The background of the discussion on the development of political dynasties in Indonesia in this research is due to the phenomenon of local level dynasties politics that developed in various regions in Indonesia, such as Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, North Sulawesi, South Sulawesi, Papua, the Region Special Yogyakarta and Bali. In addition, the pros and cons of the emergence of dynastic politics reveal a new face for the political culture of the Indonesian people in politics and democracy. The dynasty's political strategy was used as a tool to secure power by placing family or relatives in certain posts in the formal (government) or informal (projects or business) fields. In the history of Indonesian government, there have been political dynasties for generations. If this continues, the dynastic politics will develop rapidly and the pros and cons will emerge in the midst of implementing a government based on Pancasila democracy. This study aims to determine the implementation of governance in Indonesia and to determine the influence of political dynasties on the development of Pancasila democracy in Indonesia.

Keywords: Pancasila, Democracy, Political Dinasty



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur diberbagai daerah,. Konsepnya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik kemudian menjadi budaya politik masyarakat Indonesia. Melihat

potret dinasti politik di Indonesia sebagai suatu proses dalam regenerasi serta kontestasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pertalian darah, perkawinan, atau berada dalam satu rumpun keluarga besar. Dinasti politik ini sudah berlangsung sejak zaman orde baru dengan keluarga cendana sebagai bukti nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia.

Pada masa reformasi, dinasti politik terus terjadi. Hal yang menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah keluarga presiden Jokowi yang mana anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution yang sekarang menduduki posisi strategis pemerintahan daerah di tambah pernikahan adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melengkapi kekuatan kekuasaan politik keluarga Jokowi. Kekuasaan dinasti politik mengakar kuat di provinsi Banten yang dibentuk oleh Chasan Sohib kemudian naiknya Ratu Atut Chosiyah menggurita hingga naiknya suami, anak, menantu, adik beserta keluarga besar lainnya duduk dalam posisi eksekutif maupun legislatif DPD dan DPR.

Selain itu, ada sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah, mempunyai hubungan keluarga atau kerabat pejabat lain. Mereka tersebar di 15 daerah provinsi, seperti; Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Berkaca dari fakta di atas, bila dilihat dari analisis politik modern, kemunculan politik dinasti di akibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi. Sebab, hal ini yang kemudian secara struktural mengakibatkan otonomi overdosis, sehingga muncul kemudian kekuasaan etnis di daerah. Dari etnisitas inilah dinasti tumbuh, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik dan pendidikan politik tidak berjalan dengan baik.

Hingga tahun 2020 presentase dinasti politik di Indonesia naik sebesar 14,78% atau 80 wilayah dari 541 wilayah, data tersebut di peroleh setelah pilkada diselenggarakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari "jurnal dinasti politik dalam pilkada di Indonesia" mengungkapkan bahwa undang-undang tentang pilkada nomor 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa calon pemimpin daerah tidak boleh memiliki hubungan darah dengan petahana atau politisi lain. Namun, ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 34/ PUU-XIII/2015 karena keputusan tersebut hanya bersifat politis dan asertif seolah-olah setiap calon yang memiliki hubungan dengan petahana akan membentuk dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa.

Memang demokrasi tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dinasti politik berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia seperti praktek manipulasi untuk memenangkan anggota keluarga yang dilakukan oleh bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, dengan memanfaatkan jabatan untuk memenangkan anaknya Iti Octavia Jayabaya pada pilkada Lebak tahun 2013. Hal serupa dilakukan juga oleh Ratu Atut sebagai gubernur Banten yang memenangkan ibu tirinya Heryani pada pilkada Banten tahun 2010 dengan cara membagi-bagikan uang kepada sejumlah kepala desa (money politik). Dampak buruk lainnya adalah regenerasi pemerintahan yang berputar hanya dalam satu atau beberapa keluarga saja yang tidak disertai dengan kapasitas dan kapabilitas leadership hingga nantinya kepentingan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan dalam pemerintahan dan orang yang berkompeten tersingkirkan.

Fatkhuri, seorang pemerhati politik, alumni Australia National University Canberra mengungkapkan bahwa sebuah politik dinasti mengandaikan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Biasanya ini adalah cara agar sanak famili bisa dengan mudah meraih jabatan publik. Politik dinasti juga ditandai dengan adanya sanak saudara yang menduduki posisi strategis dalam lembaga politik.

Tujuannya adalah agar sanak saudaranya dengan mudah mendapatkan jabatan tinggi dalam organisasi politik. Sehingga politik dinasti lebih cenderung menampilkan kekuasaan yang koruptif.

Teori negarawan Inggris abad ke-19 Lord Acton "power tends to corrupt absolut power corrupt absolutely", secara implisit berpesan bahwa sumber korupsi adalah kekuasaan, lebih tepatnya kekuasaan yang absolut. Dinasti Soeharto memang tidak dominan di panggung politik, tetapi menguasai akses ekonomi, sehingga rakyat tidak mendapatkan hak-hak ekonomi secara adil. Dinasti Soeharto telah melahirkan oligarki.

Banyak sekali pandangan pro dan kontra terhadap politik dinasti, namun, menurut para pakar ilmu politik bahwa tidak semua politik dinasti didasari atas upaya untuk meleggangkan kekuasaan keluarga. Dalam beberapa hal politik dinasti dijalankan dalam rangka melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, tanpa menggunakan label keluarga. Adanya sikap pro dan kontra terhadap kemunculan dinasti politik ini sangat erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat, budaya politik sendiri berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Maka, pertanyaan yang relevan yakni bagaimana sistem pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila ditengah budaya politik dinasti yang terus berkembang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan untuk menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu salah satu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta menganalisa permasalahan yang ada dan menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Fakta yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi pancasila di Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sedangkan Data primernya yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang akan dibahas. Dan untuk pemahaman yang lebih luas dan lebih terperinci, maka buku-buku serta informasi dari media dan juga jurnal-jurnal yang terkait dengan hal ini, menjadi rujukan tambahan data sekunder sebagai katagori fenomena faktual, sebab yang diteliti adalah berita yang sering didiskusikan di kenchah perpolitikan Indonesia dewasa ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indetik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Menurut Yossi Nurmansyah, ST dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya bebarapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN (AG Paulus, Purwokerto).

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:

1. Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
4. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya korupsi.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah dampak negatif apabila politik dinasti diterukan yaitu:

1. Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.
2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.
3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pembahasan

Teori behavioral: mengapa politisi membentuk dinasti politik

Tujuan utama politik ialah untuk memperoleh kekuasaan maka dari itu perilaku politisi yang menciptakan dinasti politik akan terus berorientasi kepada kekuasaan, karena kekuasaan memiliki segala keuntungan baik untuk pribadi maupun keluarga. Alasan seorang politisi atau pejabat ingin mewariskan jabatan kepada keluarga adalah kebutuhan akan rasa aman dari pengusutan kebijakan-kebijakan di masa jabatannya, Disamping tentunya ada hasrat ingin memperluas imperium bisnis keluarga. Politik dinasti adalah praktik penyimpangan demokrasi

yang sehat dan beradab juga merupakan deviasi semangat reformasi 1998 lalu. Praktik politik dinasti adalah wujud dari nepotisme.

Meskipun banyak orang menyarankan bahwa para pemimpin politik merekayasa suksesi dinasti sebagai pertahanan strategi untuk melumpuhkan penuntutan korupsi di masa depan. Namun, menyangkut hubungan antara keluarga politik kelompok yang relatif sempit yang mendominasi posisi politik di lokasi tertentu dan klan yang lebih luas tempat mereka menjadi bagian lembaga negara dan partai, penting untuk menentukan bagaimana keluarga politik cocok dengan keberpihakan politik informal yang lebih luas. Variasi dalam konfigurasi politik lokal adalah apa yang diperhitungkan. Dimana elit lokal terfaksinasi dan antar elit persaingan tinggi, dan di mana masyarakat sipil lokal relatif independen, kemungkinan muncul untuk aliansi anti petahanan yang luas yang dapat memaksa pemegang kekuasaan korupsi dari jabatannya.

Penggunaan teori kritis untuk melihat dampak buruk dari dinasti politik

Dari point yang sudah dibuat di atas kita jadi tahu kenapa segelintir politisi menggunakan dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan. mari kita kutip pernyataan Ari Dwipayana seorang dosen ilmu politik dari universitas Gadjah Mada. "Pertama menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai, sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan," dari pernyataan beliau yang pertama kita bisa mengetahui bahwa dinasti politik mengganggu fungsi partai yang seharusnya menjadikan orang – orang yang capable untuk negara dan masyarakat diacuhkan dan lebih memilih orang yang sudah dipikirkan oleh partai agar pemilu selanjutnya partai itu Kembali berkuasa. Seperti, anak dari wali kota.

"Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme," dari pernyataan selanjutnya kita jadi tahu kalau dinasti politik membuat lingkungan demokrasi menjadi tidak bersih. Dengan kata lain adanya kasus – kasus korupsi yang melimpah, kolusi atau kerja sama untuk melawan hukum, dan nepotisme yang artinya memilih seseorang hanya karena dia adalah kerabat atau anak dari si A dan bukan karena kapabilitasnya sebagai pemimpin.

Penggunaan teori dekonstruksi terhadap tulisan "dinasti politik: basis politik dan kepuasan publik"

Di tulis oleh Wimmy Haliim dan Andy Ilman Hakim. Mereka meneliti kepuasan publik di bidang Kesehatan, ekonomi, dan Pendidikan . Dari penelitian yang mereka temukan, diketahui bahwa respon public terhadap pelayanan dinasti politik keluarga Sutrisno pemimpin daerah Kediri, rata-rata puas. Dari puskesmas yang dibuka dengan banyak, lalu peningkatan ekonomi yang bagus, dan juga beasiswa di beberapa sekolah di Kediri. Namun kami akan menggunakan teori dekonstruksi untuk melihat bahwa dinasti politik walaupun secara angka menguntungkan untuk masyarakat tapi sebenarnya bisa menjadi mala petaka.

Kita semua tahu bahwa dinasti politik itu buruk untuk sistem demokrasi. Walaupun kita bisa melihat bahwa masyarakat kediri merasa puas dengan adanya sistem dinasti politik. Kita tahu bahwa dinasti politik bisa memunculkan nepotisme. Bisa dibayangkan bila kerabat Sutrisno yang terpilih menjadi ketua DPR-D di kediri. Padahal dia tidak memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi ketua DPR-D tapi tetap terpilih karena dampak dinasti politik di Kediri. Anggaran daerah yang tidak merata, atau bahkan sampai menjadi terhambat karena dana yang dikeluarkan tidak sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Kita juga harus waspada terhadap efek yang akan terjadi bila ada dinasti politik. Yaitu, kolusi. Kolusi berarti melawan hukum dengan kerja sama. Karena semua yang menduduki

kekuasaan satu keluarga tentunya semuanya menjaga satu sama lain bila ada yang melanggar hukum. Kita bayangkan bila si A melakukan korupsi Bersama si B, dan si C mengetahui itu dari anomali anggaran. Karena si C merupakan keluarga dari si A dan si B tentunya si C tidak akan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib.

Politik dinasti memang menggiurkan bila kita melihat data yang keluar. Namun, bukan berarti kita tidak bisa bersikap kritis terhadap apa yang terjadi. Mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Kata "rakyat", "demokrasi", dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi kita pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni "polis" atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik. Artinya, politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak.

Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi (private interest). Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan "yang umum" atau "yang publik", prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah republik, bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab di dalam republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti.

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahan raja-raja, politik dinasti diturunkan dari sistem terbelakang ini. Di dalam republik, para pendiri bangsa kita menetapkan keyakinan pada kerangka kebersamaan untuk kemaslahatan umum, di mana kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Dalam Republik, para pendiri bangsa yang egalitarian membuang cara pandang feodal yang membuat para elite dan keluarga kaya-penguasa memandang diri dan keluarga mereka sebagai makhluk-makhluk istimewa yang berbeda derajatnya dengan kebanyakan rakyat. Intinya, sejauh kita masih bermaksud meneruskan republik warisan pendiri bangsa, politik dinasti tidak dapat kita terima.

Apa Pagaruh Dinasti Politik Terhadap Demokrasi pancasila?

Pemilu yang di selenggarakan setiap lima tahun sekali sekaligus menjadi kompetensi politik dimana rakyat bebas menentukan pilihannya guna mewakili suaranya kelak baik untuk kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Setidaknya harapan rakyat setelah terpilih wakilnya agar mereka lebih mementingkan dan mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hakekat dari demokrasi bukan hanya suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara, akan tetapi lebih dari itu yakni suatu proses untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi rakyatnya. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang ada di Indonesia dengan demokrasi yang berada di negara lainnya. Dalam praktek demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari membicarakan bagaimana cara bernegara, bermasyarakat, dan menjalankan pemerintah. Didalam bernegara membahas tentang bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintahan. Rakyat mempunyai suatu hak kebebasan dalam bernegara akan tetapi didalam negara ada suatu konstitusi atau hukum yang mengatur hak dan kebebasan seseorang dalam bernegara agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Cerminan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang dilaksanakan lima tahunan dalam bentuk pemilu, merupakan hak asasi setiap warga negara untuk bebas menentukan pilihan kepada siapa yang diinginkan untuk di pilih.

Praktek Politik Dinasti

Politik Dinasti dapat diartikan sebagai pisau bermata dua. Artinya, di satu sisi, praktik politik dinasti merampas hak orang lain karena berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada sisi lain, pelarangan terhadap seseorang yang mempunyai hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah bagian dari dinasti politik itu sendiri dan juga melanggar hak politik seseorang sehingga bertentangan dengan asas demokrasi. Maka, dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pelarangan dimaksud bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti dihalalkan melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tak jauh-jauh yang bisa kita pelajari dari suksesi kepemimpinan dalam sebuah pemilihan kepala desa yang lumrah diwarnai dengan politik dinasti. Walau tetap dengan pemilihan langsung, calon yang ikut kompetisi berasal dari dinastinya, seperti istri, anak atau kerabatnya.

Pada konteks pro dan kontra politik dinasti, pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan, yaitu politik dinasti dinilai tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi di sisi lain hal itu kerap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi. Muncul Pertanyaannya, apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Menggerus demokrasi? Seperti ungkapan di atas, politik dinasti sudah menggejala sejak lama. Hal ini akan semakin jelas pada era kerajaan yang memang kekuasaan turun temurun.

Fenomena pemilihan kepala desa secara langsung, politik dinasti juga menjadi hal yang lumrah. Walau dipilih secara langsung, peranan ke-dinasti-an tetap berjalan, walaupun dengan proses demokrasi. Memasuki era reformasi sedikit merubah memperoleh kekuasaan dengan demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung. Namun tidak menghilangkan praktik politik dinasti itu sendiri. Menjawab pertanyaan apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya mengebiri demokrasi karena praktik-praktik politik dinasti cenderung memengaruhi proses yang mestinya demokratis, menjadi tidak demokratis karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, kekuatan, pengaruh, finansial dan infrastruktur politik yang kuat. Artinya, "bungkusnya demokrasi tetapi isinya tidak demokratis" (Nurgiansah, 2022).

Pada zaman kerajaan, menentukan pemimpin berdasarkan pewarisan serta ditunjuk secara langsung. Dewasa ini mencari kepala daerah lewat jalur politik prosedural. Dimana keluarga para elite kekuasaan lewat institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Artinya, "Patrimonialistik dibungkus dengan Prosedural". Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang berproses di Indonesia dan akan melemahkan demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena politik dinasti, cenderung mengabaikan kompetensi, rekam jejak, kaderisasi dan kepatantasan. Benar, Salah Politik Dinasti. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warganya. Demokrasi memungkinkan warga negara berpartisipasi, bisa langsung atau lewat perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kesetaraan dalam demokrasi mencakup kondisi politik, ekonomi sosial, dan budaya.

Namun pada sisi yang lain, politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis. Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki, dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan praktik nepotisme kebijakan. Politik dinasti dianggap salah, karena berpotensi kuat menyuburkan budaya nepotisme. Betapa tidak, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh hanya sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dengan demikian secara politik, ada kecenderungan mempertahankan kekuasaan dengan cara menyuburkan politik dinasti dengan tujuan agar kekuasaannya terpilihah dan kebobrokkannya terus terjaga. Artinya, “menjaga agar kekuasaan tidak direbut oleh lawan politiknya atau kelompok yang berseberangan”. Sisi lain, dengan terbukanya politik dinasti, maka peluang orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan semakin subur dan terbuka. Sebaliknya, ada orang yang lebih kompeten, lebih memiliki kapasitas bisa tergusur dan tidak dipakai karena alasan subjektif.

Secara Yuridis Formal tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan keluarga atau dinasti. Secara Filosofi, harapannya kehidupan demokrasi ke depan mestinya akan jauh lebih baik dan terasa lebih adil. Secara Sosiologis, masih ada masyarakat yang belum menerima praktek politik dinasti itu sendiri. Bagaimana cara mencegah politik dinasti terus berkembang? Salah satunya yaitu melalui pola rekrutmen partai politik. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Praktik ini akan menegasikan hak setiap orang dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Praktik dinasti politik ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam proses rekrutmen politik. Filter utama untuk menjaring calon-calon dan kaderkader berkualitas yang akan diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik. Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi penting karena jika rekrutmen tidak baik, maka juga akan berdampak tidak baik juga terhadap partai politik yang justru akan melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik

Terkait hal ini terdapat beberapa pilihan bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen politik, yaitu: (i) model partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis; (ii) model compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM; (iii) model immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut; serta (iv) model civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan seorang calon di masyarakat.

Rekrutmen Partai Politik

Dalam konteks rekrutmen politik tersebut, partai politik dapat melakukan proses rekrutmen melalui proses rekrutmen terbuka atau juga melalui proses rekrutmen tertutup. Jika menggunakan rekrutmen terbuka, maka syaratnya harus menampilkan seseorang tokoh yang dapat diketahui kinerjanya secara luas oleh publik. Dalam hal ini partai politik harus menyuguhkan calon yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya.

Hal ini sejalan praktik negara demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses rekrutmen terbuka dapat dikatakan sebagai mekanisme rekrutmen yang demokratis, karena menampung aspirasi publik. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka

ini adalah terciptanya mekanisme yang demokratis, tingginya tingkat akuntabilitas karena rekam jeaknya dapat dinilai, terciptanya kompetisi politik yang adil atau fair, serta diharapkan dapat melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

Adapun praktik rekrutmen tertutup merupakan praktik rekrutmen yang berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam hal ini syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.

Dengan demikian cara ini kurang kompetitif karena menutup akses publik. Hal ini menyebabkan demokrasi hanya berfungsi sebagai sarana bagi elit untuk memperbaharui legitimasinya. Mekanisme rekrutmen tertutup ini juga dapat berkontribusi dalam pembentukan dinasti politik. Pada prinsipnya, setiap partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Artinya setiap partai politik diberikan kebebasan untuk itu dan proses yang dipilihnya akan menentukan karakteristik partai politik itu sendiri.

Jika ditinjau dari beberapa pilihan proses rekrutmen di atas, idealnya partai politik seharusnya dapat mengedepankan proses rekrutmen model civil service reform atau model compartmentalization dengan proses rekrutmen yang terbuka. Partai politik harus mendasari pemilihan calon pemimpin tersebut berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima oleh publik. Selain kapabilitas yang mumpuni, prosesnya juga harus dilakukan secara terbuka guna menghindari kepentingan-kepentingan yang cenderung politis.

KESIMPULAN

Dari ketiga teori sebagai pisau analisis yang telah kita sampaikan untuk membahas suatu fenomena maka, dapat kita simpulkan bahwa adanya praktik dinasti politik ini membawa pengaruh besar bagi demokrasi di negara kita Indonesia. Dikarenakan adanya kepentingan keluarga dalam memperoleh kekuasaan sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme amat mudah dilakukan dan sulit untuk di berantas. Selain itu, regenerasi pemerintahan hanya berputar pada satu atau beberapa keluarga saja dan dapat mengganggu fungsi partai karena orang-orang yang berkompoten di acuhkan.

Secara hukum politik dinasti sah saja diberlakukan tapi yang harus kita kritisi adalah politik dinasti yang bersifat abuse of power karena itulah yang akan menghancurkan tatanan demokrasi Indonesia. Politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis. Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki, dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan praktik nepotisme kebijakan. Politik dinasti dianggap salah, karena berpotensi kuat menyuburkan budaya nepotisme.

Betapa tidak, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh hanya sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dalam konteks itu, mengingat rekrutmen politik dapat menjadi pintu bagi terbukanya praktik dinasti politik, maka partai-partai politik harus mendasari pemilihan calon yang akan diusung berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima dengan baik oleh publik. Meskipun studi-studi sebelumnya sudah banyak membahas soal dinasti politik, namun jarang yang mendiskusikan bagaimana proses rekrutmen politik dijalankan oleh partai politik dan mengapa calon yang berasal dari keluarga tersebut yang dinominasikan, sehingga kedepan diperlukan riset-riset lanjutan terkait hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, and Muhammad Uhaib As'ad, 'Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia', *South East Asia Research*, 24.3 (2016), 420–35 <<https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>>
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, ed. by Pustaka Sinar Harapan, edisi keti (jakarta, 1991)
- Haliim, Wimmy, and Andy Ilman Hakim, 'Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik', *Jurnal Politik Profetik*, 8.2 (2020), 258 <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a4>
- Indonesia, 3 Dampak Buruk Dinasti Politik Jika Terus Diterapkan di, 'No Title', *IDN Times*
- Nika, Imroatun, 'Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 562–77 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>>
- Nurgiansah, T. H. (2022). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7310–7316. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>
- Sukri, Mhd. Alfahjri, 'Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10.2 (2020), 169–90
- Susanti, Martien Herna, 'Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia', *Journal of Government and Civil Society*, 1.2 (2018), 111 <<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>>